

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018- 2023



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023 yang penyusunannya didasarkan juga pada kondisi dan aspirasi dari *stake holder* yang kesemuanya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Kota Padang Panjang. Selanjutnya Renstra yang telah tersusun ini akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang selama 5 tahun.

Ucapan terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2023 ini dengan harapan semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang Panjang, April 2019

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



SYAHDA NUR, SH, MM

Pembina Utama Muda, NIP.19640815 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra Provinsi	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	60
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	60

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	68
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII	PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dokumen rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada RPJMD Provinsi (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras sebagai jenis makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Sedangkan definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Karena itu, Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (food security), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam, manusia,

sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (food resiliency); dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (food sovereignty).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bahkan kemandirian pangan adalah dengan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis sektor lain.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan amat berpengaruh terhadap keberadaan organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan karakter daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, organisasi perangkat daerah yang diberi tugas untuk urusan pangan dan pertanian yaitu Dinas Pangan dan Pertanian. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan penggabungan dari Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Padang Panjang. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka semua yang berkaitan dengan kegiatan selanjutnya diperlukan pula perubahan atau penyesuaian, diantaranya adalah Rencana Strategis Dinas yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan akan dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan dan Pertanian.

Memahami hal tersebut di atas maka dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang sudah disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terakhir yang ada di Kota Padang Panjang. Dimana hal itu tetap merupakan suatu upaya yang terprogram dan sistematis serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang;
8. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023; dan
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan naskah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023;
2. Tersedianya dokumen yang mampu menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang; dan
4. Sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pangan dan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan bidang lain.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ini adalah :

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, yang merupakan jabaran dari visi dan misi Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Renstra Daerah Kota Padang Panjang;
2. Sebagai pedoman bagi pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk periode 2018-2023 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskeswan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan

- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

8. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

9. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

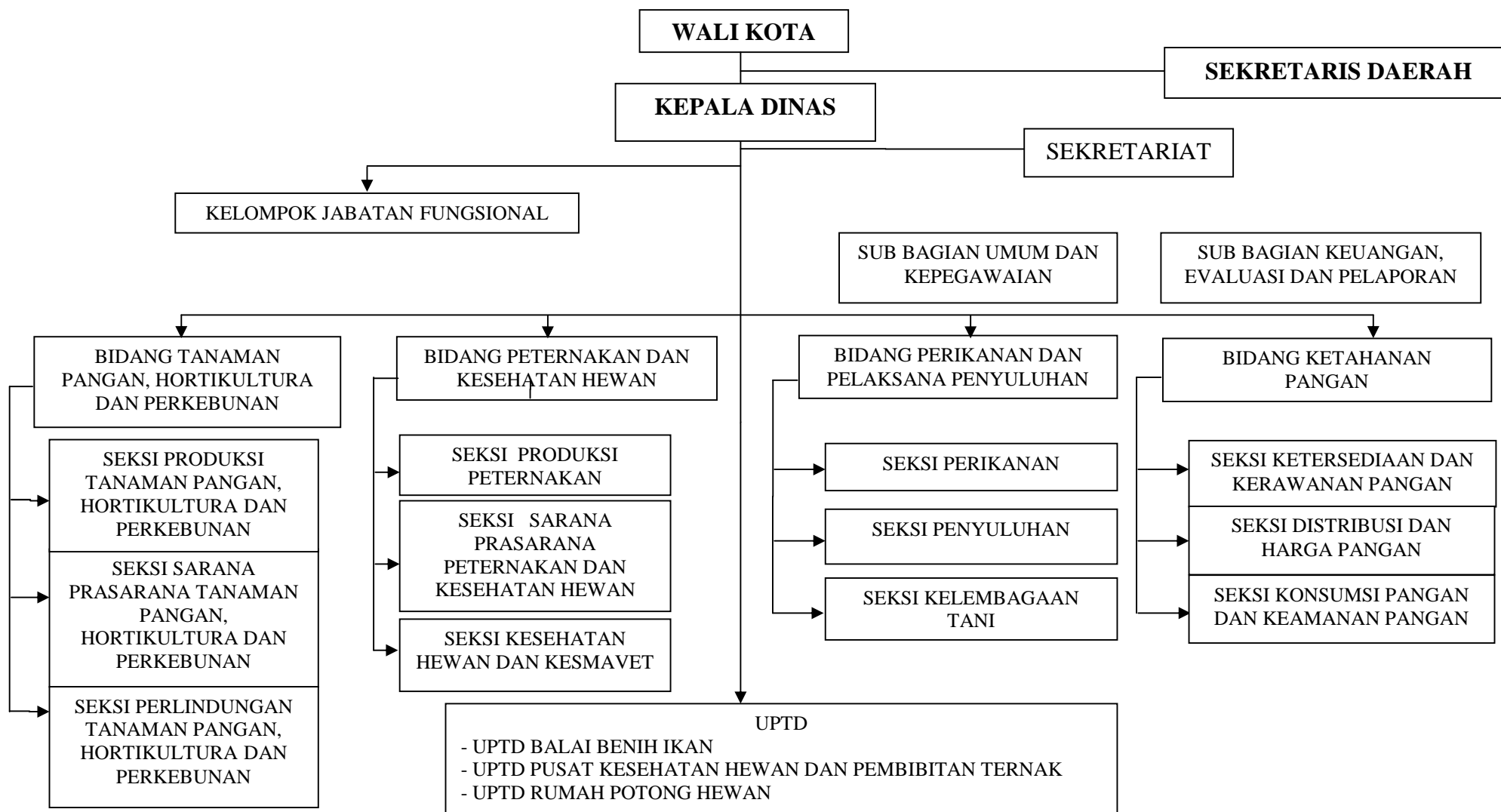
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Kondisi jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Gol Ruang PNS				Pendidikan							Jenis Kelamin		Jml	
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D III	D IV	S1	S2	P	L	PNS	THL
1	Dinas Pangan dan Pertanian	-	7	26	7	1	-	17	1	-	37	3	32	26	40	24
2	UPTD BBI	-	-	3	-	-	-	8	-	-	4	-	2	10	3	9
3	UPTD Puskesmas	1	3	1	1	1	2	8	-	-	5	-	2	14	6	10
4	UPTD RPH	-	1	2	-	1	1	6	1	-	2	-	3	8	3	8
	Jumlah	1	11	32	8	3	3	39	2	-	48	3	40	58	52	46

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Berdasarkan data Rekapitulasi Pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diatas jumlah PNS sebanyak 52 orang dan THL sebanyak 46 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada kepala seksi pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh kepala seksi yang bersangkutan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Transportasi

Jumlah kendaraan dinas untuk operasional, baik yang berada di Dinas Pangan dan Pertanian maupun pada UPTD Puskesmas, BBI dan RPH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Roda 4	Roda 3	Roda 2	Roda 6
1	Kantor Dinas Pangan dan Pertanian	5	1	39	-
2	UPTD BBI	-	3	2	-
3	UPTD RPH	1	-	4	1
4	UPTD Puskesmas	-	1	5	-
	Jumlah	6	5	50	1

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

b. Prasarana Gedung Kantor

1. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terletak di jalan Ahmad Yani No 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
2. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dibangun pada tahun 2011 dan terletak di kawasan RPH Kelurahan Silaing Bawah. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan laboratorium kesehatan hewan, fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan bibit sapi perah unggul melalui program Rearing Unit.
3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dengan luas 2 ha terletak di Kelurahan Silaing Bawah dan baru direnovasi pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. UPTD RPH ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pemotongan sesuai dengan standar dan sudah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pemotongan sesuai syariat islam.
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan luas 2 ha terletak di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk. Balai Benih Ikan ini sudah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk komoditas Ikan Nila serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium kualitas air, ruang pertemuan dan mess/tempat penginapan. Mess atau tempat penginapan memiliki 11 kamar dengan kapasitas huni sebanyak 44 yang digunakan untuk mendukung fungsi BBI sebagai pusat pelatihan perikanan dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum.

2.2.3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana peningkatan produksi pertanian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Luas Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	630
2	Perkebunan	264
3	Peternakan	3,50
4	Perikanan	5,14
5	Sungai	13,11

Sumber Data: Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 630 ha, perkebunan seluas 264 ha, peternakan seluas 3,50 ha, perikanan seluas 5,14 dan sungai seluas 13,11 ha.

2.2.4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	126
2	Gabungan Kelompok Tani	16

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 126 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 16 kelompok. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa kelompok yang kurang aktif.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					4	5	4	5	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				8,5%	85%	84,1%	85%	98,94%	100%
2	Persentase Produksi Benih Perikanan (%)				100%	52,50%	73,92%	52,54%	73,92%	100,08%
3	Persentase Produksi Ikan Konsumsi				100%	81,30%	96,08%	81,33%	96,08%	100,04%
4	Persentase Produktivitas sektor pertanian (%)				NA	1%	NA	-28,78%	NA	-28,78%
5	Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun				NA	481.469 liter/tahun	NA	442.170 liter/tahun	NA	91,84%
6	Persentase Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian				5,58	5,67%	5,41	5,41%	96,95%	95,41%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran persentase produksi benih perikanan adalah Jumlah produksi benih ikan (ekor) bagi target daerah (ekor) kali seratus persen.
3. Cara pengukuran persentase produksi ikan konsumsi adalah jumlah ikan konsumsi (ton) bagi target daerah (ton) kali seratus persen.
4. Cara pengukuran persentase produktivitas sektor pertanian adalah selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali seratus persen.
5. Cara pengukuran peningkatan produksi rata-rata susu per tahun adalah jumlah produksi susu keseluruhan dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian adalah Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali seratus persen.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Produktivitas Sektor Pertanian

Capaian Persentase Produktivitas Sektor Pertanian pada Tahun 2018 sebesar -28,78% dengan persentase capaian sebesar -2.878%. Produktivitas padi tahun 2018 sebesar 4,5 ton/ha angka sementara data dari Badan Pusat Statistik, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 6,4 ton/ ha. Target indikator kinerja persentase produktivitas sektor pertanian tahun 2018 ditargetkan naik 1% dari produktivitas padi tahun lalu.

2. Peningkatan Produksi Rata-Rata Susu Per Tahun

Capaian peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 sebesar 442.170 liter/tahun dengan persentase capaian sebesar 91,84%. Indikator peningkatan produksi rata-rata susu per tahun pada tahun 2018 ditergetkan 481.469 liter/tahun.

Indikator Kinerja Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian/ perkebunan tidak mencapai target tahun ke lima rencana strategis, dengan masalah sebagai berikut:

Hambatan/ masalah:

1. Menurunnya Produksi dan Produktivitas komoditi tanaman pangan (padi) karena : adanya perbaikan jaringan irigasi Kubang Laweh yang sempit membuat jadwal tanam tertunda selama delapan bulan (Januari-Agustus) di Kelurahan Ekor Lubuk Kelompok Tani Simbaru Seluas 1 Ha.
2. Adanya serangan hama tikus seluas 79,5 ha, hama kresek 1,9 ha dan Blast 6 ha sepanjang tahun.
3. Adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi perkantoran, perumahan, tempat ibadah dan sebagainya.
4. Berkurangnya populasi sapi perah dikarenakan beberapa peternak melakukan penjualan sapi.
5. Daya serap pasar yang terbatas terhadap produk susu sehingga menimbulkan kurangnya animo peternak sapi perah untuk menambah atau meningkatkan populasi ternaknya.
6. Masih tinggi biaya operasional produksi sapi perah (pakan dan lain-lain).

Strategi pemecahan masalah:

1. Perbaiki jaringan irigasi Kubang Laweh.
2. Adanya himbuan kegiatan Gerakan Berburu Tikus di Kota Padang Panjang, serta adanya bantuan sarana penangkapan hama tikus seperti racun tikus dan sebagainya.
3. Perlunya penyusunan perda penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Padang Panjang.
4. Meningkatkan daya serap penjualan susu murni/ penambahan pasar susu.
5. Melakukan inseminasi buatan menggunakan semen beku sexing untuk meningkatkan kelahiran anak sapi perah betina.
6. Perlunya central pakan penyediaan bahan baku pakan untuk ternak sapi perah sehingga bisa menekan biaya operasional.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2017)	(2018)	(2017)	(2018)	(2017)	(2018)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.748.690.750	2.645.278.400	2.435.253.720	2.161.163.127	88,60	81,70	2.696.984.575	2.298.208.424
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000	3.927.000	3.570.000	3.927.000	100,00	100,00	3.748.500	3.748.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.880.000	121.020.000	108.993.841	93.933.457	65,71	77,62	143.450.000	101.463.649
Kegiatan Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	493.469.585	567.354.900	382.568.499	369.473.357	77,53	65,12	530.412.243	376.020.928
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.700.000		87.975.000		81,69		53.850.000	43.987.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	950.478.965	764.614.000	872.164.905	610.298.935	91,76	79,82	857.546.483	741.231.920
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.010.000	29.000.000	43.520.000	28.986.500	98,89	99,95	36.505.000	36.253.250

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	37.267.500	52.340.000	28.485.550	37.797.600	76,44	72,22	44.803.750	33.141.575
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.675.000	16.000.000	11.894.300	15.744.850	93,84	98,41	14.337.500	13.819.575
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	96.780.000	47.250.000	73.789.000	44.813.700	76,24	94,84	72.015.000	59.301.350
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	347.000.000	498.771.500	345.672.553	497.988.543	99,62	99,84	422.885.750	421.830.548
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	489.859.700	545.001.000	476.620.072	458.199.185	97,30	84,07	517.430.350	467.409.629
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	162.563.548	300.084.000	112.188.500	266.592.210	69,01	88,84	231.323.774	189.390.355
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.700.000	103.650.000	22.680.000	98.410.300	91,82	94,94	64.175.000	60.545.150
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	40.000.000	65.000.000	39.260.000	64.642.650	98,15	99,45	52.500.000	51.951.325
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	61.670.000	74.034.000	48.608.500	49.843.500	78,82	67,33	67.852.000	49.226.000

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	36.193.548	10.000.000	1.640.000	6.695.760	4,53	66,96	23.096.774	4.167.880
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	0	47.400.000	1.640.000	47.000.000		99,16	23.700.000	24.320.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	30.000.000	18.000.000	9.100.000	60,00	30,33	30.000.000	13.550.000
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	30.000.000	18.000.000	9.100.000	60,00	30,33	30.000.000	13.550.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	591.000	649.800	405.000	649.800	68,53	100,00	620.400	527.400
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.000	129.700	87.500	129.700	74,15	100,00	123.850	108.600
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	140.000	154.000	100.000	154.000	71,43	100,00	147.000	127.000
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Proknoisis Realisasi Anggaran	100.000	133.100	100.000	133.100	100,00	100,00	116.550	116.550
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	233.000	233.000	117.500	233.000	50,43	100,00	233.000	175.250

Program Peningkatan Ketahanan Pangan	194.450.000	333.812.500	182.125.575	299.907.645	93,66		264.131.250	241.016.610
Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	21.237.500	84.897.500	20.178.000	82.060.000	95,01		53.067.500	51.119.000
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	121.850.000	108.600.000	113.204.700	89.220.795	92,90	82,16	115.225.000	101.212.748
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman	23.972.500	114.415.000	23.021.000	109.919.800	96,03	96,07	69.193.750	66.470.400
Kegiatan Analisis Penyuluhan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	27.390.000,00	18.450.000	25.721.875	12.758.000	93,91	69,15	22.920.000	19.239.938
Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok		7.450.000	25.721.875	5.949.050		79,85	3.725.000	15.835.463
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	236.100.000	1.216.748.000	231.671.517	532.475.000	98,12		726.424.000	382.073.259
Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	36.900.000	72.700.000	35.169.517	283.850.000	95,31		54.800.000	159.509.759
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	199.200.000	353.980.000	196.502.000	62.038.000	98,65	17,53	276.590.000	129.270.000
Kegiatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan Perikanan)		790.068.000	196.502.000	186.587.000		23,62	395.034.000	191.544.500

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	360.040.125	210.999.000	304.244.305	137.246.650	84,50		285.519.563	220.745.478
Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	252.827.625	144.323.000	215.468.505	98.010.150	85,22	67,91	198.575.313	156.739.328
Kegiatan Optimalisasi Kemampuan Komisi Penyuluh	82.012.500		65.172.700		79,47		41.006.250	32.586.350
Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	25200000	66.676.000	23.603.100	39.236.500	93,66	58,85	45.938.000	31.419.800
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	700.155.000	754.662.000	508.265.000	728.585.350	72,59		727.408.500	618.425.175
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	345.030.000	26.705.000	213.276.650	20.390.750	61,81	76,36	185.867.500	116.833.700
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	135.600.000		131.765.850		97,17		67.800.000	65.882.925
Kegiatan DAK Pertanian	144.000.000	559.359.000	144.000.000	550.959.100	100,00	98,50	351.679.500	347.479.550

Kegiatan Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	75.525.000	0	19.222.500	0	25,45		37.762.500	9.611.250
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan		168.598.000	0	157.235.500		93,26	84.299.000	78.617.750
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	736.000.000	164.360.000	607.822.700	156.340.250	82,58	95,12	450.180.000	382.081.475
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	288.450.000	65.175.000	192.876.950	61.557.250	66,87	94,45	176.812.500	127.217.100
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	393.435.000	99.185.000	367.091.250	94.783.000	93,30	95,56	246.310.000	230.937.125
Kegiatan Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	54.115.000		47.854.500		88,43		27.057.500	23.927.250
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	90.277.450	31.475.000	82.573.950	28.822.900	91,47	91,57	60.876.225	55.698.425

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	69.500.000	31.475.000	66.763.500	28.822.900	96,06	91,57	50.487.500	47.793.200
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	20.777.450		15.810.450		76,09		10.388.725	7.905.225
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	322.425.000	272.804.000	298.422.700	235.790.850	92,56	86,43	297.614.500	267.106.775
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	322.425.000	272804000	298422700	235.790.850	92,56	86,43	297.614.500	267.106.775
Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	1.738.115.000	2.162.286.000	932.991.575	1.978.407.407	53,68	91,50	1.950.200.500	1.455.699.491
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak	723.760.000	1.071.715.000	670.679.375	991.118.157	92,67	92,48	897.737.500	830.898.766
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	0	290.644.000	0	280.938.500		96,66	145.322.000	140.469.250

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	1.014.355.000	48.900.000	262.312.200	27.846.750	25,86	56,95	531.627.500	145.079.475
Kegiatan Sarana dan Prasarana Peternakan		751.027.000	262.312.200	678.504.000		90,34	375.513.500	470.408.100

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
4. Rendahnya produktivitas usaha tani;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/ hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

2.4.2 Peluang

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 5.236,8 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 253 hari dalam setahun, sehingga pertanaman dan usaha perikanan darat dapat dilakukan;
3. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,4 %). (sumber PPDA tahun 2018);

5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah, tanaman hias dan aneka cabai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Padang Panjang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pertanian dan Pangan Kota Padang Panjang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Padang Panjang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pertanian dan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Padang Panjang dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal	1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	1. Keterbatasan kemampuan ekonomi 2. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi) 3. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum 4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
2.	Menurunnya jumlah populasi ternak	1. Masih rendahnya produksi susu sapi 2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak	1. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi susu sapi 2. Masih tingginya angka kematian hewan

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya penerapan teknologi pasca panen peternakan 4. Belum adanya izin edar produk olahan susu 5. Masih adanya indukan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
3.	Rendahnya Pendapatan Petani Ikan pada Usaha Budidaya Ikan	1. Rendahnya produksi perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan 2. Rendahnya kualitas SDM Petani Ikan dalam Budidaya Ikan 3. Belum Adanya Penghasil Pakan Ikan dengan Harga yang Terjangkau
4.	Rendahnya Produksi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian 2. Rendahnya Produktivitas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Lahan untuk Pemukiman dan Lain-lain sangat Tinggi 2. Berkembangnya Hama Penyakit Tanaman 3. Petani Kebanyakan Penggarap 4. Kurangnya SDM Petani yang Mengelola Kelembagaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			5. Belum Optimalnya Penyuluh dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.
5.	Rendahnya pendapatan petani peternak	1. Masih tingginya angka kemiskinan peternak	1. Belum optimalnya SDM peternak 2. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Padang Panjang adalah “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT” yang di dukung oleh 3 Misi, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif dan partisipatif.

Dinas Pangan dan Pertanian mendukung Misi ke satu yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tujuan 1) meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dan 2) Mengurangi jumlah kk miskin yang bergerak di sektor pertanian. Sasaran 1) Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 2) Jumlah KK miskin yang bergerak di sektor pertanian (Bidang Peternakan) yang mendapat bantuan. Dengan strategi Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan arah kebijakan : 1). Meningkatnya ketahanan pangan; 2) Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan; dan 3) Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos.

Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian yang mendukung secara langsung Program Walikota Padang Panjang “Gerakan Warga Berdaya Kota Berjaya (Pemanfaatan pekarangan dan lingkungan menanam bunga, sayur, buah, pohon, beternak, berkolam, industri rumah tangga” adalah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3.3. Telaahan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan rencana strategi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari renstra Dinas Pangan Sumatera Barat mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat system distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan. Sasaran Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKP tahun 2015-2019, dapat diperhatikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local	1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local	1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam
	2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan	2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
	3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok	3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
	4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya local	4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman
		Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	5. Mewujudkan keamanan pangan segar	5. Meningkatkan keamanan pangan segar	5. Tercapainya keamanan pangan segar

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal; dan
5. Penanganan keamanan pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjang Stok Beras Nasional;
 - b. Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan;
 - c. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - e. Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA);
 - f. Kawasan Mandiri Pangan;
 - g. Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - h. Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - i. Dukungan produksi pertanian dan pemasaran;
 - j. Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan
 - k. Dukungan manajemen dan administrasi SOLID.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - a. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia;
 - b. Lembaga distribusi pangan masyarakat;
 - c. Lumbung pangan masyarakat;
 - d. Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN;
 - e. Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan;
 - f. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan
 - g. Kajian Jaringan Distribusi Pangan.
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - a. Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - b. Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. Gerakan Diversifikasi Pangan;
 - d. Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. Model pengembangan pangan pokok lokal; dan
 - f. Pengawasan keamanan dan mutu pangan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, Visi dari Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Kemandirian Pangan dan Kualitas Hasil Pertanuan serta Rumah Tangga Petani yang Sejahtera”.

Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Unggul: Menghasilkan produk pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang berproduksi tinggi, berkualitas, aman dikonsumsi, menguntungkan petani dan konsumen, diminati pasar, sehingga mampu berdaya saing di pasar domestik maupun internasional. Usaha terus menerus untuk meningkatkan kemampuan on farm dan off farm petani agar hasil produksi maupun hasil olahan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat memberikan peningkatan pendapatan petani.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian di Sumatera Barat sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan hortikultura dan perkebunan) dan diperkirakan akan tetap menjadi pengarah perekonomian Sumatera Barat di masa depan dimana sebagian besar penduduk Sumatera Barat menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Karena itu pembangunan sektor pertanian pada tahun 2016-2021 akan menjadi prioritas pembangunan dalam kerangka pengembangan ekonomi Sumatera Barat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, maka penyusunan Renstra ini harus dapat menjawab tantangan pembangunan sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sehingga terjadi perubahan yang lebih baik, untuk itu penyusunan dokumen Renstra 2017-2021 menetapkan **Tujuan Strategis** sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatkan Kinerja Organisasi.

Sasaran Strategis dalam membangun pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan kedepan di Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tabel 3.3
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (%)							
				- Padi	%	2,2	2,22	2,25	2,27	2,29	2,30

				- Jagung	%	7,87	8,41	8,67	9,25	10,28	11,11
				- C a b e	%	5,00	5,80	6,00	6,50	7,00	7,50
				- Manggis	%	2	2	2	2	2	2
				- Kakao	%	-	1	1,12	1,14	1,16	1,18
				- Karet	%	-	1	1,10	1,12	1,15	1,20
				- Kelapa Sawit	%	-	1	1,05	1,10	1,15	1,20
				- Kopi Arabika	%	-	1	1,03	1,05	1,07	1,09
				- Kopi Robusta	%	-	1	1,03	1,05	1,07	1,09
				- Tan. Pangan	%	1	1	1	1	1	1
				- Hortikultura	%	1	1	1	1	1	1
				- Perkebunan	%	1	1	1	1	1	1
II	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	BB	BB	BB	BB	B	BB
				Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	95	95	95	95	95	95
				Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	%	95	95	95	95	95	95

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan tahun 2017 – 2021 disusun berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dengan visi pembangunan adalah **”Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2014 – 2019 dengan visi **”Terwujudnya Sistem Pertanian – Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk**

Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan bertumpu pada kondisi strategis lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, baik lingkungan internal maupun eksternal, SDM serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki. Strategi umum yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana strategis tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan; dan
2. Meningkatkan Kinerjanya Kinerja Organisasi.

Secara konseptual pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistem usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usaha tani dan hilir serta jasa penunjang. Penggunaan waktu keluarga petani yang lebih efisien dan aktivitas yang lebih banyak dari beberapa sub sektor yang berkaitan merupakan fokus pembangunan pertanian kedepan, sehingga untuk alokasi waktu yang sama keluarga petani akan memperoleh pendapatan yang lebih besar. Untuk mewujudkan rumah tangga petani yang sejahtera, kebijakan pembangunan pertanian adalah:

1. Meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi unggulan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
2. Pengembangan kawasan sentra produksi agribisnis;
3. Meningkatkan efisiensi usahatani dan mutu produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan pemberdayaan aparatur, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan;
6. Meningkatkan pemberdayaan petani;
7. Mengembangkan usaha-usaha peningkatan nilai tambah komoditi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan unggulan;
8. Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing;

9. Melakukan pemasyarakatan pertanian organik dan memfasilitasi sistem pertanian organik;
10. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana, lahan air dan alsintan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
11. Mengembangkan LKMA di pedesaan;
12. Pembentukan sentra produksi perkebunan sesuai potensi;
13. Penguatan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk pendidikan lanjutan bagi penyuluh;
14. Peningkatan Koordinasi, Lobi dan Kerjasama dengan Badan Diklat di Pusat;
15. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penyuluh;
16. Pengembangan metodologi penyuluhan;
17. Pengembangan dan penerapan teknologi di lapangan;
18. Pembinaan dan pendampingan program dan kegiatan oleh penyuluh;
19. Penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dan swasta (CSR);
20. Fasilitasi temu petani, penyuluh dan peneliti;
21. Fasilitasi program dan kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK);
22. Pembinaan, pendampingan dan pengawalan program dan kegiatan di BPK;
23. Pengintegrasian usaha pertanian pada satu kawasan; dan
24. Perluasan kawasan integrasi.

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

VISI: “ TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAN KUALITAS HASIL PERTANIAN SERTA RUMAH TANGGA PETANI YANG SEJAHTERA “			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN			
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Tanaman Pangan,	Meningkatnya Produksi Komoditi Tanaman Pangan,	Meningkatkan Produksi Komoditi Tanaman Pangan,	- Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Hortikultura dan Perkebunan	Hortikultura dan Perkebunan	Hortikultura dan Perkebunan	- Pengembangan Kawasan sentra Produksi
			- Meningkatkan Efisiensi Usaha Tani dan Mutu Produksi
			- Pengembangan Teknik Pengendalian OPT yang Efektif dan Efisien
MISI II: MEWUJUDKAN SISTEM PERTANIAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI BERKELANJUTAN			
	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Meningkatkan Pemberdayaan Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan sesuai Kebutuhan
			- Meningkatkan Pemberdayaan Petani
			- Mengembangkan Usaha-usaha Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
			- Pengembangan Komoditi Unggulan yang Berdaya Saing
MISI III : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BAIK			
Meningkatnya Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola	Meningkatkan Kualitas	- Penyusunan Perencanaan dan

Organisasi	Organisasi	Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik	Penganggaran OPD
			- Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan
			- Penata Usahaan Keuangan OPD
			- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan
			- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka visi dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: "Sumbar Pusat Pangan Asal Hewani Sumatera Bagian Tengah"

Visi tersebut mengandung kata kunci sbb:

Pusat Pangan Asal Hewan adalah

1. Sumatera Barat sebagai produsen ternak (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi : Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur
2. Pangan Asal Hewan adalah produk yang dihasilkan oleh ternak berupa daging, telur dan susu.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi SKPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan adalah:

“Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan”.

Sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak;
2. Meningkatnya status kesehatan hewan; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.5 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan produksi peternakan Sumatera Barat	Persen Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.Meningkatnya produksi pangan asal ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.75
		2.Meningkatnya status kesehatan hewan	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,6	0,4	0,3	0.2	0.1	0.1
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95

Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	1. Meningkatkan produksi pangan asal ternak	Ekstensifikasi (mengembangkan) dan intensifikasi (meningkatkan) kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
			2. Meningkatkan perbibitan sapi lokal berbasis kawasan dan kelompok peternak
			3. Memperluas dan mengembangkan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas
			4. Meningkatkan mutu produk peternakan dan kesehatan hewan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
			5. Merekomendasi penetapan kawasan peternakan berdasarkan potensinya
			6. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			8. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan
			9. Meningkatkan pengendalian gangguan reproduksi pada ternak sapi
			10. Peningkatan aplikasi bioteknologi reproduksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
	2.Meningkatnya status kesehatan hewan	a.Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Brucellosis	1. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota & Puskesmas)
			2. Meningkatkan Surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan
		b. Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	1. Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis
			2. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas).
			3. Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
			4. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana dan Bahan Medik
			5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit – Unit Pelayanan Kesehatan Hewan & Kesmavet
			6. Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
			7. Pemberdayaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner
			8. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium veteriner.
	9. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>10. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO).</p> <p>11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti</p> <p>12. Pengembangan media informasi di bidang kesehatan hewan melalui pengembangan website dan jenis-jenis media informasi lainnya</p> <p>13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular</p>
	3.Meningkatnya tata kelola organisasi	<p>a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan organisasi melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi,tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja</p> <p>b. Organisasi, peningkatan pengawasan,</p>	<p>1. Meningkatkan budaya kinerja aparatur</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>1. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten</p> <p>2. Peningkatan diklat bagi aparatur</p> <p>3. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.</p> <p>4. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
		d. Meningkatkan konsistinsi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan
			2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan
		e. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi	1. Peningkatan kualitas basis data perencanaan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015 – 2019 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Madani

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis nilai – nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluratistis, bersifat terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin serta material dan spiritual.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian serta tersedianya prasarana publik terkait infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari

dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan.

TUJUAN

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya kinerja organisasi.

SASARAN

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan indikator:
 - a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun 2021.
 - b. Pendapatan Pembudidaya ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/Thn pada tahun 2021.
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan(SDKP) yang berkelanjutan dengan indikator :
 - a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80% pada tahun 2021.
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan
 - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar pada tahun 2021.
 - b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021.
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi :
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A.
 - b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas sampai dengan tahun 2021 : sebesar > 95%.

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan Pendapatan pelaku usaha perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan	Rp/org/th	24.000.000	33.600.000	34.800.000	36.000.000	37.200.000	38.400.000
			- Jumlah pendapatan pembudidaya ikan	Rp/org/th	38.400.000	40.800.000	43.200.000	45.000.000	47.400.000	49.800.000
		2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	%	52	57	58	70	75	80
		3. Meningkatkan Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	146,3	147,76	149,24	150,73	152,24	153,76
			- Konsumsi Ikan Hasil Perikanan	Kg/kap/th	36,41	36,53	36,63	37	38	39
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	4. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A
			- Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

Dokumen Acuan : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan	a. Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	- Jumlah Pendapatan Nelayan ... Rp/org/th
		b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th		- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan ... Rp/org/th
			Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan	- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
		c. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
				- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja - Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8 Permasalahn Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Budidaya	Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat. 2. Perkembangan pembangunan makin meningkat yang mengakibatkan alih fungsi lahan 3. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Masih Belum Optimal. 2. Kebutuhan Atas Pangan Yang Semakin Meningkat. 3. Adanya Perda No 2. Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang beserta turunannya 4. Intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi baru

Hasil Telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hasil analisa dan rekomendasi KLHS mulai dari penyusunan isu strategis sampai ke penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Beberapa rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ringkasan telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam skema berikut :

Tabel 3.9
Telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
III	Pencapaian TPB					
	Tujuan 2 : Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	Kinerja urusan pertanian	Pertumbuhan ekonomi	Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian: Arah Kebijakan Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias Peningkatan produksi sub sektor peternakan	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan, Peningkatan produksi sub sektor peternakan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kinerja urusan pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian Arah Kebijakan: - Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias - Peningkatan produksi sub sektor peternakan	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Program Pengembangan Budi Daya Perikanan - Program Peningkatan Produksi Peternakan

Sumber Data: KLHS Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. ASPEK TEKNIS

- a. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- b. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- c. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
- d. Status kepemilikan lahan.

2. ASPEK EKONOMIS

- a. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
- b. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- c. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan
- d. Peningkatan pendapatan petani.

3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos; dan
4. Meningkatnya Pendapatan Petani.

Dengan Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2018-2023 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada				
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan		1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,05	3,17	3,30	3,43	3,56
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan	85	85,25	85,5	85,75	86
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Produksi Susu Sapi	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	432.000 liter/tahun	450.000 liter/tahun	468.000 liter/tahun
			2. Pendapatan Pembudidaya Ikan	17.222.000 rupiah/tahun/ RTP	18.083.100 rupiah/tahun/ RTP	18.987.255 rupiah/tahun/ RTP	19.936.618 rupiah/tahun/ RTP	20.933.449 rupiah/tahun/ RTP
			3. Produksi Padi	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7216 ton	7.448 ton
			4. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	5%	25%	50%	75%	100%
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan		1. Angka Kemiskinan	5,45	5,03	4,6	4,18	3,75
			2. Indeks Gini	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
		Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	2%	8%	10%	11%	12%
3.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		1. Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10,29	10,31	10,34	10,36	10,39
		Meningkatnya Pendapatan Petani	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	10%	20%	30%	40%	50%

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Tujuan Pertama yang ditetapkan adalah meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan dengan sasaran 1) Meningkatnya ketahanan pangan; dan 2) Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.

Sasaran Pertama dari tujuan pertama adalah meningkatnya ketahanan pangan. Adapun yang menjadi indikator sasarnya adalah Skor Pola Pangan Harapan. Pada Tahun Pertama Renstra (tahun 2019), nilai skor pola pangan harapan 85, untuk 5 (lima) tahun kedepan ditargetkan jumlah skor pola pangan harapan akan bertambah sebanyak 85,25 pada tahun 2020, 85,5 skor pada tahun 2021, 85,75 skor tahun 2022 dan 86 skor tahun 2023. Saat ini konsumsi pangan padi-adian, minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang terlihat dari skor AKE yang melebihi skor maksimum. Sementara konsumsi terhadap pangan umbi-umbian, pangan hewani dan gula masih dibawah yang dianjurkan.

Sasaran ke dua dari tujuan pertama adalah meningkatnya produksi pertanian dan perikanan. Adapun yang menjadi indikator sasarnya adalah produksi susu sapi dengan target 396.000 liter/tahun pada tahun 2019, 414.000 liter/tahun pada tahun 2020, 432.000 liter/tahun pada tahun 2021, 450.000 liter/tahun pada tahun 2022 dan 468.000 liter/tahun pada tahun 2023. Rata-rata produksi susu sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari. Upaya untuk peningkatan produksi susu sapi ini sangat didukung oleh ketersediaan bibit unggul, penyediaan pakan, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknik pengolahan dan pemasaran susu.

Begitu juga dengan indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 17.222.000 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2019, 18.083.100 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2020, 18.987.255 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2021, 19.936.618 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2022 dan 20.933.449 rupiah/ tahun/ RTP pada tahun 2023. Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk. Pengembangan usaha

perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 5,14 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

Kemudian indikator kinerja produksi padi yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 6.634 ton pada tahun 2019, 6.750 ton pada tahun 2020, 6.983 ton pada tahun 2021, 7.216 ton pada tahun 2022 dan 7.448 ton pada tahun 2023. Upaya peningkatan produktivitas padi tersebut di atas dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

Indikator kinerja persentase terbentuknya klaster tanaman hias yang dilaksanakan selama tahun 2019-2023 ditargetkan akan meningkat secara berturut turut dari 5 % pada tahun 2019, 25% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, 75% pada tahun 2022 dan 100% pada tahun 2023. Tanaman Hias merupakan komoditi unggulan di Kota Padang Panjang yang sangat potensi untuk dikembangkan dilihat dari segi agropedoklimat yang mendukung dan letak Kota Padang Panjang yang strategis. Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman Hias melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 521.305.2013 tanggal 26 Maret 2013. Terbentuknya Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) Kota Padang Panjang tanggal 5 Juni 2018 sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Tanaman Hias di Kota Padang Panjang. Pembentukan klaster bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi tanaman hias, peluang pasar dengan mengembangkan konsep agrowisata untuk kesejahteraan petani tanaman hias di Kota Padang Panjang.

Tujuan kedua yang ditetapkan adalah Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut dari 2% pada tahun 2019, 8% pada tahun 2020, 10 % pada tahun 2021, 11 % pada tahun 2022 dan 12 % pada tahun 2023. Hal ini didukung dengan meningkatnya bantuan sosial setiap tahunnya baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi dan Dana APBN.

Tujuan ketiga yang ditetapkan adalah Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan indikator sasarannya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani. Sepanjang tahun 2019-2023 pendapatan petani akan meningkat secara berturut-turut sekitar 10% pada setiap tahunnya. Pendapatan petani diutamakan komoditinya adalah padi karena luas lahan sawah adalah 630 Ha dengan pendapatan awal sebesar Rp.2.000.000/bulan/ha. Untuk menunjang peningkatan pendapatan petani adalah dengan menerapkan teknologi di bidang pertanian dan peningkatan Sumber Daya Manusia Petani. Pada sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhkan) terdaftar petani yang bergerak di bidang pertanian sebanyak 2.344 orang di Kota Padang Panjang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat			
Misi I : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	1. Fasilitasi Pemanfaatan lahan pekarangan 2. Fasilitasi Pengolahan Pangan lokal dan pemanfaatan teknologi 3. Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan
	2. Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	1. Peningkatan Produksi Peternakan dan Produk Olahannya	1. Pembinaan peningkatan produksi dan kualitas produk peternakan 2. Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen 3. Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
		2. Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	1. Fasilitasi penyediaan benih unggul 2. Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi produksi dan pasca panen perikanan 3. Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Perikanan 4. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran
		3. Peningkatan Produksi Padi	1. Fasilitasi peningkatan Penggunaan Teknologi budidaya pertanian 2. Fasilitasi penyediaan benih unggul 3. Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan Tani dan Petugas
		4. Peningkatan Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tanaman hias 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelembagaan (Asosiasi Petani Tanaman Hias)
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	1. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bantuan Sosial	1. Memberikan Bantuan Ternak Sesuai Permintaan Calon Penerima Bansos 2. Pembinaan dan Evaluasi perkembangan penerima bantuan sosial	1. Fasilitasi Peningkatan pendapatan petani penerima Bantuan sosial

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatkan Pendapatan Petani	1. Pemakaian Teknologi di Bidang pertanian	1. Meningkatkan Kemampuan SDM Petani dalam Penggunaan Teknologi Pertanian

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada tabel Tabel 6.1 berikut:

RENSTRA OPD KOTA PADANG PANJANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PERIODE 2018-2023

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan 1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,79 (%)	3,05		3,17		3,30		3,43		3,56		3,56	
Sasaran 1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	(Index)	85		85,25		85,5		85,75		86		86	
1-09-10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase angka kecukupan energi (AKE)	97,83 (%)	100	882.304.800	100	688.000.000	100	717.500.000	100	650.850.000	100	658.685.000	100	3.597.339.800
		Persentase angka kecukupan protein (AKP)	104,04 (%)	100		100		100		100		100		100	
1-09-10-01	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah uji sampel keamanan pangan	(Kali)	1	52.525.000	2	65.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	12	342.525.000
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan yang dilaksanakan	(Kali)	1		2		2		2		2		9	
1-09-10-02	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Suplay Pangan	Jumlah buku pola pangan harapan yang disusun	(Buku)	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10.000.000
1-09-10-04	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah pelatihan pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan	(Kali)	4	201.060.000	2	210.000.000	2	215.000.000	2	218.000.000	2	220.000.000	12	1.064.060.000
		Jumlah lomba pemanfaatan pekarangan	(Kali)	1		1		1		1		1		5	
1-09-10-06	Kegiatan Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan	Jumlah kelompok mandiri pangan yang dibina	(Kelompok)	2	58.235.000	3	75.000.000	3	75.000.000	4	85.000.000	4	85.000.000	4	378.235.000
1-09-10-07	Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah paket sembako yang tersedia	(Paket)	50	27.374.800	0	0	0	0	0	0	0	0	50	27.374.800
1-09-10-08	Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah dokumen NBM (Neraca Bahan Makanan) dan buku database ketahanan pangan	(Dokumen)	2	12.700.000	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	2	46.585.000	10	175.135.000
1-09-10-09	Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelatihan/ pertemuan pengolahan pasca panen pengolahan hasil pertanian	(Orang)	10	110.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	110.420.000
1-09-10-10	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	(Kali)	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20.000.000
1-09-10-11	Pemantauan Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	Jumlah Perda LP2B yang dihasilkan	(Perda)	1	138.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138.850.000
1-09-10-12	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Ranperda/ Perwako yang disusun	(Dokumen)	1	36.727.500	0	75.000.000	0	85.000.000	0	0	0	0	1	196.727.500
		Jumlah cadangan pangan pemerintah	(Ton)	0		10		14		0		0		24	
1-09-10-14	Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan dan Suplay Pangan	Jumlah buku pola pangan harapan yang disusun	(Buku)	0	0	20	15.000.000	20	16.000.000	20	17.500.000	20	19.100.000	80	67.600.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1-09-10-15	Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah pelatihan yang dilakukan	(Kali)	2	203.800.000	2	203.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	10	1.015.800.000
		Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	(Kali)	2		2		2		2		2		2	10
1-09-10-16	Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah pemantauan harga pangan pokok Kota Padang Panjang	(Kali)	104	10.612.500	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	96	10.000.000	480	50.612.500
Sasaran 2	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Produksi Susu Sapi	(Liter/Tahun)	39.6000		41.4000		43.2000		450.000		468.000		468.000	
		Pendapatan Pembudidaya Ikan	(Rp/Th/RTP)	17.222.000		18.083.100		18.987.255		19.936.618		20.933.449		20.933.449	
		Produksi Padi	(Ton)	6.634		6.750		6.983		7216		7.448		7.448	
		Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	(%)	5		25		50		75		100		100	
2-01-20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	720,64 (Ton)	650	590.609.000	680	614.195.360	700	641.082.374	720	670.405.669	750	703.421.896	750	3.219.714.299
2-01-20-01	Peningkatan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan (operasional BBI)	(Jenis)	6	114.500.000	6	120.000.000	6	130.000.000	6	140.000.000	6	150.000.000	6	654.500.000
2-01-20-02	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah bidang DAK yang dilaksanakan	(Bidang)	1	400.409.000	1	416.425.360	1	433.082.374	1	450.405.669	1	468.421.896	1	2.168.744.299
2-01-20-03	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	(Kali)	3	75.700.000	3	77.770.000	3	78.000.000	3	80.000.000	3	85.000.000	3	396.470.000
2-03-18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	1 (Tahun)	1	1.783.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.783.728.000
2-03-18-05	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah keikutsertaan florikultura	(Kali)	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.000.000
2-03-18-06	DAK Bidang Pertanian	Jumlah DAK bidang pertanian	(Bidang)	1	1.713.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.713.728.000
2-03-19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Hias	71.548 (Tangkai)	73.847	0	76.062	3.013.414.400	79.105	2.540.382.192	83.060	2.988.793.213	87.213	2.678.946.839	87.213	11.221.536.644
		Produktivitas Padi	6,42 (Ton/ha)	5,7		5,8		6,2		6,3		6,4		6,4	
		Luas Lahan Pertanian Organik	9,7 (ha)	9,7		10,7		11,7		11,7		12,7		12,7	
2-03-19-01	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah labor kultur jaringan yang beroperasi	(Unit)	0	0	1	420.000.000	1	235.000.000	1	165.000.000	1	240.000.000	4	1.060.000.000
		Jumlah pembibitan tanaman hias yang dilaksanakan	(ha)	0		1		1		1		1		1	
		Jumlah pengembangan pertanian organik yang dilaksanakan	(ha)	0		1		1		0		1		3	
2-03-19-04	Kegiatan Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Jumlah pemuda peserta pelatihan operator alsintan	(oh)	0	0	30	20.000.000	30	23.000.000	30	27.000.000	30	30.000.000	120	100.000.000
2-03-19-05	Kegiatan Pengembangan Proteksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan	(Kali)	0	0	2	174.000.000	2	184.000.000	2	194.000.000	2	196.000.000	8	748.000.000
		Jumlah peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	(oh)	0		20		20		20		20		80	
		Jumlah sarana proteksi tanaman	(Jenis)	0		2		2		2		2		8	
2-03-19-06	Kegiatan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah peserta pelatihan teknologi hasil yang dilaksanakan	(Orang)	0	0	13	600.000.000	13	200.000.000	13	600.000.000	13	100.000.000	52	1.500.000.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah tanah yang disewa, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman hias	(klaster)	0		1		1		1		1		1	
		Jumlah pengadaan sarana prasarana pengembangan komoditi tanaman hias (demplot tanaman hias)	(Jenis)	0		3		3		0		0		3	
		Jumlah festival dan parade bunga	(Kali)	0		0		0		1		0		1	
2-03-19-08	DAK Bidang Pertanian	Jumlah DAK Bldang Pertanian	(Bidang)	1	0	1	1.799.414.400	1	1.898.382.192	1	2.002.793.213	1	2.112.946.839	1	7.813.536.644
2-03-21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penurunan penyakit ternak/ hewan	(%)	5	307.565.000	7	338.321.500	7	338.321.500	9	372.153.650	10	409.369.015	10	1.765.730.665
2-03-21-01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah pengadaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies	(Jenis)	100	307.565.000	100	338.321.500	100	338.321.500	100	372.153.650	100	409.369.015	100	1.765.730.665
		Jumlah pemeriksaan hewan qurban	(Ekor)	700		650		660		655		650		3315	
		Jumlah penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	(Ekor)	170		160		150		170		190		840	
		Jumlah uji sampel	(Sampel)	192		200		200		200		200		992	
		Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	(Ekor)	90		70		50		50		50		310	
		Jumlah vaksinasi HPR	(Ekor)	1400		1500		1400		1400		1400		7100	
		Jumlah pengobatan, pelayanan ternak/ hewan	(Pelayanan)	950		985		995		1000		1010		4940	
		Jumlah Kasus Zoonosis	(Kasus)	3		2		1		0		0		6	
2-03-22	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Peternakan / Produk Peternakan	4 (%)	5	1.973.464.300	6	1.588.708.100	7	1.468.537.290	8	1.239.883.561	9	1.255.895.205	9	7.526.488.456
2-03-22-01	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal	(Produk)	1	813.009.000	1	731.708.100	2	658.537.290	3	592.683.561	3	533.415.205	10	3.329.353.156
		Jumlah bibit ternak sapi perah pada rearing unit	(Ekor)	50		40		25		20		15		150	
		Jumlah kelahiran ternak hasil IB	(Ekor)	210		250		280		290		310		1340	
		Jumlah sapi pembibitan	(Ekor)	11		2		2		2		2		19	
2-03-22-02	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah kk miskin yang dibantu	(KK)	14	457.395.300	0	0	0	0	0	0	0	0	14	457.395.300
2-03-22-03	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah pusat agribisnis peternakan	(Unit)	1	87.800.000	1	487.000.000	1	699.000.000	1	377.200.000	1	382.480.000	1	2.033.480.000
		Jumlah Livestock Expo yang diikuti	(Kali)	1		1		1		1		1		5	
		Jumlah pelaksanaan tuan rumah livestock Expo Tingkat Provinsi	(Kali)	0		0		1		0		0		1	
		Festival susu	(Kali)	0		1		1		1		1		4	
2-03-22-04	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana peternakan	(Unit)	2	615.260.000	3	370.000.000	2	111.000.000	2	270.000.000	3	340.000.000	12	1.706.260.000
		Jumlah sertifikasi produk susu	(Produk)	3		2		1		1		1		8	
		Jumlah tugu sapi perah/ susu	(Unit)	0		2		2		0		0		4	
		Penyediaan lahan abadi peternakan	(ha)	0		0		2		0		0		2	
Tujuan 2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan	Angka Kemiskinan	6,17 (Kali)	5,45		5,03		4,6		4,18		3,75		3,75	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kesenjangan	Indeks Gini	0,30 (%)	0,28		0,27		0,26		0,25		0,24		0,24	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	(%)	2		8		10		11		12		12	
2-03-27	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Pertanian	Persentase Masyarakat Msikin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	18 (%)	35	0	47	500.110.000	65	500.110.000	82	500.110.000	90	500.110.000	90	2.000.440.000
2-03-27-01	Pendistribusian Bibit Ternak Pada Masyarakat	Jumlah KK miskin yang dibantu	(KK)	0	0	15	500.110.000	15	500.110.000	15	500.110.000	15	500.110.000	74	2.000.440.000
Tujuan 3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	10,24 (Rupiah)	10,29		10,31		10,34		10,36		10,39		10,39	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	(%)	10		20		30		40		50		50	
2-03-15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase cakupan Pembinaan kelembagaan Pertanian dan Perikanan	45,45 (%)	56,06	74.999.800	66,67	206.874.795	76,77	160.046.665	88,89	162.047.831	100	170.252.615	100	774.221.706
2-03-15-02	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	Jumlah penilaian kelompok tani berprestasi	(Kelompok)	3	74.999.800	3	126.874.795	3	80.046.665	3	82.047.831	3	90.252.615	15	454.221.706
		Jumlah peserta pertemuan kelompok tani	(oh)	1000		1500		2000		2500		3000		10000	
		Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional di Padang	(Kali)	0		1		0		0		0		1	
		Jumlah fielday kelembagaan tani	(Kali)	0		1		1		1		1		4	
2-03-15-03	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Guna	Jumlah teknologi yang akan diterapkan	(Jenis)	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000
		Jumlah fielday penerapan pertanian teknologi tepat guna	(Kali)	0		1		1		1		1		4	
2-03-15-04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah temu teknis penyuluh	(Kali)	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000
		Jumlah pelatihan budidaya pertanian	(Kali)	0		1		1		1		1		4	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 (%)	100	2.624.989.400	100	2.642.919.840	100	2.886.984.824	100	3.155.456.307	100	3.450.774.937	100	14.761.125.308
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	(Buah)	1000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	4.500.000
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	(Tagihan)	96	198.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96	198.220.000
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	(Unit)	54	545.126.900	61	490.614.210	61	539.675.631	61	593.643.194	61	653.007.514	61	2.822.067.449
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	(Orang)	28	620.524.000	7	682.576.400	7	750.834.040	7	825.917.444	7	908.509.188	7	3.788.361.072
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	(Jenis)	50	53.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50	53.500.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra		
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopi yang disediakan	(Jenis)	10	61.279.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10	61.279.500	
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	(oh)	1350	87.500.000	1800	78.750.000	2475	86.625.000	2723	95.287.500	2995	104.816.250	11343	452.978.750	
0-00-01-08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dan luar daerah	(oh)	295	485.725.000	295	437.152.500	295	480.867.750	295	528.954.525	295	581.849.978	1475	2.514.549.753	
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran yang disiapkan	(Orang)	28	553.114.000	37	608.425.400	37	669.267.940	37	736.194.734	37	809.814.207	37	3.376.816.281	
0-00-01-11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	(Jenis)	10	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15.500.000	
0-00-01-18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah materai	(Buah)	0	0	1000	133.231.330	1000	146.149.463	1000	160.359.410	1000	175.990.350	4000	615.730.553	
		Jumlah barang cetakan dan Jumlah fotocopi yang disediakan	(Jenis)	0		10		10		10		10		10		
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	(Jenis)	0		50		50		50		50		50		
		Jumlah Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	(Laporan)	0		3		3		3		3		3		12
		Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, LKjip, LKPJ,LPPD,SPIP, DAK, pengukuran kinerja, laporan realisasi kegiatan fisik dan keuangan belanja modal/ peng	(Laporan)	0		14		14		14		14		14		56
0-00-01-19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	(Tagihan)	0	0	96	212.170.000	96	213.565.000	96	215.099.500	96	216.787.450	384	857.621.950	
		Jumlah komponen listrik yang tersedia	(Jenis)	0		10		10		10		10		10		
0-00-02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 (%)	100	153.434.000	100	344.590.600	100	578.049.660	100	383.854.626	100	422.240.089	100	1.882.168.975	
0-00-02-05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	(Unit)	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000	
0-00-02-06	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rehab gedung kantor yang dilaksanakan	(Unit)	0	0	2	90.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	5	370.000.000	
0-00-02-08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	(Unit)	7	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65.000.000	
0-00-02-11	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah pemerintah daerah yang diproses	(Sertifikat)	1	15.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000	
0-00-02-17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	(Jenis)	4	73.434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	73.434.000	
0-00-02-32	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	(Jenis)	0	0	10	234.590.600	10	258.049.660	10	283.854.626	10	312.240.089	10	1.088.734.975	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	(Unit)	0		7		7		7		7		7	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	(Jenis)	0		4		4		4		4		4	
0-00-03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	(%)	90	0	90	116.400.000	90	0	90	140.844.000	100	0	100	257.244.000
0-00-03-11	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	(Jenis)	0	0	2	116.400.000	0	0	2	140.844.000	0	0	4	257.244.000
0-00-05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 (%)	100	50.000.000	100	45.000.000	100	51.750.000	100	59.512.500	100	68.439.375	100	274.701.875
0-00-05-05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur mengikuti bimtek	(Orang)	8	50.000.000	10	45.000.000	12	51.750.000	14	59.512.500	16	68.439.375	60	274.701.875
0-00-06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan dan disampaikan tepat waktu	100 (%)	100	799.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799.800
0-00-06-01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja OPD, Renja, LKJip, LKPJ, LPPD, SPIP, Penetapa Kinerja	(Laporan)	12	499.900	0	0	0	0	0	0	0	0	12	499.900
0-00-06-02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	(Laporan)	8	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	8	299.900
					8.441.894.100		10.098.534.595		9.882.764.505		10.323.911.357		10.318.134.971		49.065.239.528

Tabel 6.2 Data Program dan Kegiatan

No	Elemen Data	Definisi Data	Satuan	Ketersediaan		Nilai Data					
				SIPD	Permendagri 86 Tahun 2017	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pangan										
	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	ketersediaan energi dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu	%	Tidak Ada	Tidak Ada	108,8	104,7	102,7	106,8	97,8	100,6
	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	ketersediaan protein dalam pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu tertentu	%	Tidak Ada	Tidak Ada	99,7	100,1	98,7	103,6	104	109,9
2.	Pertanian										
	Cakupan Pembinaan Lembaga Pertanian dan Perikanan	Penumbuhan kelembagaan pertanian dan perikanan dan aktivitas kelembagaan	keltan	Tidak Ada	Tidak Ada	60	64	70	76	81	95
	Jumlah Jenis Penyakit Hewan Ternak	Jumlah penyakit hewan ternak dalam satu tahun	jenis	Tidak Ada	Tidak Ada	51	54	52	53	51	54
	Jumlah Kasus Penanganan Penyakit Hewan Ternak dalam se Tahun	Jumlah kasus penyakit hewan/ ternak yang dapat ditangani dalam satu tahun	kasus	Tidak Ada	Tidak Ada	1.710	1.813	1.860	1.869	1.971	1.986
	Persentase penurunan penyakit Ternak/hewan	Jumlah Kasus penyakit hewan/ ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen	%	Tidak Ada	Tidak Ada	0	14	33,3	0	25	33,3
	Persentase peningkatan Produktivitas Peternakan / Produk Peternakan	Jumlah produksi peternakan tahun berjalan dibagi jumlah produksi tahun lalu dikali seratus persen	%	Tidak Ada	Tidak Ada	9	23	6	27	36	19
	Produksi Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias	tangkai	Tidak Ada	Tidak Ada	52.566	54.010	61.496	88.258	71.584	72.399
	Produktivitas Padi	Jumlah produksi/ luas panen	ton/ha	Tidak Ada	Tidak Ada	5,10	4,97	5,62	5,77	6,40	4,58
	Luas Lahan Pertanian Organik	Luas lahan yang menggunakan sistem budidaya pertanian secara organik yang diakui oleh lembaga sertifikat organik (bersertifikat)	ha	Tidak Ada	Tidak Ada	7	15,3	15,3	10,3	9,6	9,7
	Persentase cakupan Pembinaan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelembagaan yang aktif dibagi jumlah seluruh kelembagaan yang terdaftar dikali seratus	%	Tidak Ada	Tidak Ada	49,59	48,12	47,3	48,72	50,31	57,93
	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Luas lahan perikanan dikali jumlah benih yang ditebar	ton	Tidak Ada	Tidak Ada	647,85	727,14	329	345	720	610
	Persentase Masyarakat Miskin yang bergerak disektor pertanian menerima Bantuan Pertanian	Jumlah masyarakat miskin sektor pertanian dalam satu tahun dibagi jumlah masyarakat miskin di sektor pertanian pada tahun sebelumnya dikali seratus persen	%	Tidak Ada	Tidak Ada	NA	NA	NA	NA	NA	5

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Skor Pola Pangan Harapan	85	85	85,25	85,5	85,75	86	86
2.	Produksi Susu Sapi	128.061 liter/tahun	396.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun	432.000 liter/tahun	450.000 liter/tahun	468.000 liter/tahun	468.000 liter/tahun
3.	Pendapatan pembudidaya Ikan	16.360.900 rupiah/tahun/RTP	17.222.000 rupiah/tahun/RTP	18.083.100 rupiah/tahun/ RTP	18.987.255 rupiah/tahun/ RTP	19.936.618 rupiah/tahun/ RTP	20.933.449 rupiah/tahun/ RTP	20.933.449 rupiah/tahun/ RTP
4.	Produksi Padi	7.822 ton	6.634 ton	6.750 ton	6.983 ton	7.216 ton	7.448 ton	7.448 ton
5.	Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	NA	5%	25%	50%	75%	100%	100%
6.	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	NA	2%	8%	10%	11%	12%	12%
7.	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	NA	10%	20%	30%	40%	50%	50%

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 7 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah:
 - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
 - Skor AKE = % AKE x Bobot;
 - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
 - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.

2. Cara pengukuran indikator produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/ tahun.
3. Cara pengukuran indikator pendapatan pembudidaya ikan adalah Jumlah produksi ikan kali harga ikan bagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan = 712 orang).
4. Cara pengukuran indikator produksi padi adalah jumlah produksi padi/ tahun.
5. Cara Pengukuran Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias adalah progres tahapan pembentukan klaster tanaman hias:
 - a) Tahap 1 (5%) = perencanaan;
 - b) Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana;
 - c) Tahap 3 (50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM Petugas dan Petani; dan
 - d) Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias.
6. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos adalah Pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
7. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani adalah kenaikan 10% dari pendapatan petani/tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis disusun sebagai arahan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Rancangan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Dengan telah disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian visi misi Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, April 2019

**Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang**

SYAHDANUR, SH. MM

Pembina Utama Muda,

NIP. 19640815 199003 1 009